

**Loka Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan
Laut Sorong
Laporan Keuangan**

Komp. KPR PDAM Km.10 Klawuyuk, Sorong
Timur Kota Sorong - Papua Barat Daya

**Periode yang
Berakhir 30
September 2024**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 30 September 2024
Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I.	Laporan Realisasi Anggaran	
II.	Neraca	
III.	Laporan Operasional	
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	6
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI.	Lampiran dan Daftar	

**KANTOR LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
SORONG**
KOMP. KPR PDAM KM.10 KLAWUYUK SORONG TIMUR KOTA SORONG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 30 September 2024

Pt. Kepala Loka PSPL Sorong



Hendrik Sombo

Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Triwulan III Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024. Realisasi Pendapatan Negara periode tersebut adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.217.849.750 atau mencapai 110,71% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.100.000000. Realisasi Belanja Negara periode Triwulan III TA 2024 adalah sebesar Rp9.474.292.042 atau mencapai (54.28%) dari alokasi anggaran sebesar Rp17.453.891.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024. Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.966.740.768 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.009.360.228, Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.957.380.540. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp20.966.740.768

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.190.483.953. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.866.109.217, sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(8.675.625.264)

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp28.004.797 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(8.647.620.467).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 20.184.665.771 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(8.647.620.467) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp849.890 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.256.442.292, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp19.794.337.486

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Pajak Dalam Negeri	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.100.000.000,	1.217.849.750,	117.849.750,	111	718.180.000,	985.431.040,	(267.251.040,)	137,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.100.000.000,	1.217.849.750,	117.849.750,	111	718.180.000,	985.431.040,	(267.251.040,)	137,
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1.100.000.000,	1.217.849.750,	117.849.750,	111	718.180.000,	985.431.040,	(267.251.040,)	137,
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat	17.453.891.000,	9.474.292.042,	(7.979.598.958,)	54	14.392.004.000,	6.805.448.407,	7.586.555.593,	47,
1. Belanja Pegawai	4.588.366.000,	3.286.723.424,	(1.301.642.576,)	72	4.588.366.000,	2.904.610.624,	1.683.755.376,	63,
2. Belanja Barang	117.14.125.000,	5.906.659.459,	(5.807.465.541,)	50	8.509.400.000,	3.843.961.383,	4.665.438.617,	45,
3. Belanja Modal	1.151.400.000,	280.909.159,	(870.490.841,)	24	1.294.238.000,	56.876.400,	1.237.361.600,	4,
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Perimbangan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Dana Transfer Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Insentif Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
c. Dana Keistimewaan DIY	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
d. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17.453.891.000,	9.474.292.042,	(7.979.598.958,)	54	14.392.004.000,	6.805.448.407,	7.586.555.593,	47,
C. PEMBIAYAAN	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.008.481.228,	0	1.008.481.228	0,00
Piutang Bukan Pajak	639.000,	24.786.717	(24.147.717)	(97,42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0,	(123.934)	123.934	(100,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	639.000,	24.662.783	(24.023.783)	(97,41)
Persediaan	240.000,	435.000	(195.000)	(44,83)
JUMLAH ASET LANCAR	1.009.360.228,	25.097.783	984.746.445	3.923,64
ASET TETAP				
Tanah	10.279.165.000,	10.279.165.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	6.714.396.000,	6.433.486.841	280.909.159	4,37
Gedung dan Bangunan	8.372.409.039,	8.372.409.039	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.527.527.000,	1.527.527.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	63.316.000,	63.316.000	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6.999.432.499,)	(6.509.390.886)	(490.041.613)	7,53
JUMLAH ASET TETAP	19.957.380.540,	20.166.512.994	(209.132.454)	(1,04)
JUMLAH ASET	20.966.740.768,	20.191.610.777	775.613.991	3,84
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	145.342.791,	6.945.006	138.397.785	1.992,77
Utang Yang Belum Ditagihkan	18.579.263,	0	18.579.263	0,00
Uang Muka dari KPPN	1.008.481.228,	0	1.008.481.228	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.000,	0	484.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.172.403.282,	6.945.006	1.165.942.276	16.788,21
JUMLAH KEWAJIBAN	1.172.403.282,	6.945.006	1.165.942.276	16.788,21
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19.794.337.486,	20.184.665.771	(390.328.285)	(1,93)
JUMLAH EKUITAS	19.794.337.486,	20.184.665.771	(390.328.285)	(1,93)
JUMLAH EKUITAS	19.794.337.486,	20.184.665.771	(390.328.285)	(1,93)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.966.740.768	20.191.610.777	775.613.991	3,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuang

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Penghasilan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Cukai	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Pajak Lainnya	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Masuk	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bea Keluar	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	NaN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.190.483.953,	977.942.740,	212.541.213,	21,734
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.190.483.953,	977.942.740,	212.541.213,	21,734
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	NaN
Jumlah Pendapatan	1.190.483.953,	977.942.740,	212.541.213,	21,734
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Beban Pegawai	3.425.566.215,	3.033.925.931,	391.640.284,	12,909
Beban Persediaan	55.432.203,	55.416.797,	15.406,	0,028
Beban Barang dan Jasa	2.183.151.155,	1.483.561.651,	699.589.504,	47,156
Beban Pemeliharaan	253.671.130,	258.958.767,	(5.287.637,)	(2,042)
Beban Perjalanan Dinas	3.163.515.245,	1.882.694.689,	1.280.820.556,	68,031
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	294.005.700,	280.000.000,	14.005.700,	5,002

Beban Bunga	0,	0,	0,	NaN
Beban Subsidi	0,	0,	0,	NaN
Beban Hibah	0,	0,	0,	NaN
Beban Bantuan Sosial	0,	0,	0,	NaN
Beban Penyusutan dan Amortisasi	490.891.503,	424.975.817,	65.915.686,	15,51
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(123.934,)	0,	(123.934,)	-Infinity
Beban Transfer	0,	0,	0,	NaN
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH BEBAN	9.866.109.217,	7.419.533.652,	2.446.575.565,	32,975
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8.675.625.264,)	(6.441.590.912,)	(2.234.034.352,)	34,681
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	NaN
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,	4.525.000,	(4.525.000,)	(100,)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,	7.650.000,	(7.650.000,)	(100,)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,	3.125.000,	(3.125.000,)	(100,)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	NaN
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28.004.797,	212.300,	27.792.497,	13.091,143
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28.004.797,	212.300,	27.792.497,	13.091,143
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,	0,	NaN
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	28.004.797,	4.737.300,	23.267.497,	491,155
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.647.620.467,)	(6.436.853.612,)	(2.210.766.855,)	34,345
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	NaN
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	NaN
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8.647.620.467,)	(6.436.853.612,)	(2.210.766.855,)	34,345

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
DAN 30 SEPTEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20.184.665.771,	19.741.533.906,	443.131.865,	2,24
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.647.620.467,)	(6.436.853.612,)	(2.210.766.855,)	34,35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	849.890,	27.184.065,	(26.334.175,)	(96,87)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0,	0,	0,	0,
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	849.890,	27.184.065,	(26.334.175,)	(96,87)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8.256.442.292,	5.820.017.367,	2.436.424.925,	41,86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(390.328.285,)	(589.652.180,)	199.323.895,	(33,8)
EKUITAS AKHIR	19.794.337.486,	19.151.881.726,	642.455.760,	3,35

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Sorong

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai yang di amanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN memiliki satu misi “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” berdasarkan misi tersebut maka Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengoptimalkan potensi yang ada untuk pencapaian misi yang dimaksud dalam RPJMN tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong berkomitmen dengan visi “*Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Secara Terpadu dan Berkelanjutan.*” Dan misi “*Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.*” . Pada periode 30 September 2024 pegawai LPSPL Sorong terdiri dari 54 orang pegawai dengan rincian 29 orang PNS, 2 orang P3K dan 23 orang pegawai PPNPM atau kontrak. Untuk tahun 2024 ini terdapat Pengurangan 2 diantaranya Ferawati Yusuf yang mutasi ke BPSPL Makassar pertanggal 1 Juli 2024 dan Rosmini yang pensiunnya terhitung tanggal 1 Agustus 2024.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak

yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar (persen)tase tertentu dari piutang

*Tidak
Tertagih*

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang.

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Penyusutan Aset Tetap

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pertama kali dimulai tahun 2015. Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2023 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

- 1) Perubahan Penerapan Metode Penilaian Persediaan dari Harga Perkiraan Terakhir ke metode First In First Out (FIFO)

Sehubungan dengan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua (tahun 2015) hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor

234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan 20 sosial (bansos); barang rusak/usang; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan, jenis transaksi, serta jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI sama dengan metode penilaian HPT. Namun demikian, hal-hal yang membedakan metode penilaian FIFO dari HPT antara lain:

- Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat

diminimalkan.

- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi Transfer Keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT. Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI Perubahan metode penilaian persediaan dari HPT menjadi FIFO diakomodasi Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
- Saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan tahun 2022 audited menjadi saldo awal persediaan tahun 2023.
- Harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2022 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2022 menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2023 dengan metode FIFO.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.217.849.750*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.217.849.750 atau mencapai 110,71 % (persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000. Pendapatan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 30 SEPTEMBER 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.100.000.000	1.217.849.750	110,71
Jumlah	1.100.000.000	1.217.849.750	110,71

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 September TA 2024 adalah Rp1.217.849.750. dimana pada periode yang sama bila dibandingkan dibandingkan 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp985.431.040. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks pemanfaatan jenis ikan dan pendapatan lainnya. Selain itu, adanya penambahan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian pendapatan perakun dapat dilihat pada rincian berikut :

- Akun 425131 (Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan) sebesar Rp5.600.400 yang merupakan pendapatan atas tarif rumah negara (mess kantor) periode Januari-September 2024
- Akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun

Anggaran Yang Lalu) sebesar Rp28.004.797 yang rincian dari :

- a. Pengembalian terhadap base camp tenaga kerja kontruski rehab kantor senilai Rp2.500.000 yang tertuang Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023.
 - b. Pengembalian terhadap Kelebihan pembayaran jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp718.080 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023
 - c. Pengembalian terhadap realisasi belanja pemeliharaan pada LPSPL Sorong yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717. Nilai tersebut merupakan temuan yang tertuang dalam surat temuan BPK Nomor : 35/KKP/LK-KKP/04/2024, perihal Penyampian Konsep Temuan BPK, tanggal 03 April 2024
 - d. Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan senilai Rp10.810.000. Nilai tersebut merupakan temuan yang tertuang dalam surat temuan BPK Nomor : 35/KKP/LK-KKP/04/2024, perihal Penyampian Konsep Temuan BPK, tanggal 03 April 2024.
- Akun 425259 (Pendapatan Perizinan Lainnya) sebesar Rp241.110.000 yang merupakan pendapatan perizinan lainnya atas rekomendasi pemanfaatan jenis.
 - Akun 425629 (Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya) sebesar Rp943.134.553 yang merupakan pendapatan jasa kelautan atas pungutan

perdagangan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfaatannya dan atau dilarang ekspor (SIPJI)

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja Negara
Rp9.474.292.042*

Realisasi Belanja instansi per 30 September TA 2024 adalah sebesar Rp9.474.292.042 atau 54.28% dari anggaran belanja APBN sebesar Rp17.453.891.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Periode 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2024		2023	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	4	7	8
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0,
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0,
1. Pajak Dalam Negeri	0,	0,	0,	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.100.000.000,	1.217.849.750,	718.180.000,	985.431.040,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.100.000.000,	1.217.849.750,	718.180.000,	985.431.040,
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1.100.000.000,	1.217.849.750,	718.180.000,	985.431.040,
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat	17.453.891.000,	9.474.292.042,	14.392.004.000,	6.805.448.407,
1. Belanja Pegawai	4.588.366.000,	3.286.723.424,	4.588.366.000,	2.904.610.624,
2. Belanja Barang	11.714.125.000,	5.906.659.459,	8.509.400.000,	3.843.961.383,
3. Belanja Modal	1.151.400.000,	280.909.159,	1.294.238.000,	56.876.400,
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0,
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0,
6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0,
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0,
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0,
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,	0,	0,	0,
1. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0,
a. Dana Perimbangan	0,	0,	0,	0,
1. Dana Transfer Umum	0,	0,	0,	0,
a. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0,
2. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0,
b. Dana Insentif Daerah	0,	0,	0,	0,
c. Dana Keistimewaan DIY	0,	0,	0,	0,
d. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0,
2. Dana Desa	0,	0,	0,	0,
3. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17.453.891.000,	9.474.292.042,	14.392.004.000,	6.805.448.407,
C. PEMBIAYAAN	0,	0,	0,	0,

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	4.588.366.000	3.286.723.424	71,63
Belanja Barang	7.072.707.000	4.978.900.560	70,40
Belanja Modal	332.000.000	151.184.009	45,54
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	11.993.073.000	8.416.807.993	70,18
Sumber Anggaran PNBPNBP			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.210.000.000	927.758.899	76,67
Belanja Modal	130.000.000	129.725.150	99,79
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	1.340.000.000	1.057.484.049	78,92
Sumber Anggaran PLN			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	3.431.418.000	0	0
Belanja Modal	689.400.000	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	4.120.818.000	0	0,00
TOTAL AKUMULASI	17.453.891.000	9.474.292.042	54,28

Anggaran Loka PSPL Sorong, sampai dengan periode 30 September Tahun 2024 sebesar Rp17.453.891.000 yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) Rp11.993.073.000. Sumber anggaran dari PNBPNBP sebesar Rp1.340.000.000 dan sumber anggaran yang berasal dari Pinjaman Luar Neger (PLN) sebesar Rp4.120.818.000. Rincian tersebut diperuntukan untuk Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Uraian	Tahun 2024		
		Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4.588.366.000	3.286.723.424	71,63
52	Belanja Bahan	11.714.125.000	5.906.659.459	50,42
53	Belanja Modal	1.151.400.000	280.909.159	24,40
TOTAL		17.453.891.000	9.474.292.042	54,28

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp3.286.723.424

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September TA 2024 dan Per 30 September 2023 adalah masing masing Rp3.286.723.424 dan Rp2.009.170.037. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September TA 2024 dan 30 September 2024.

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA 2024		REALISASI BELANJA 2023		Kenaikan atau Penurunan
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	
1	2	3	4	5	6	7
51	BELANJA PEGAWAI					
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.069.561.500	0	1.039.848.000	0	0,03
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.713	1.144	19.631	284	-0,05
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	66.927.010	0	66.909.650	0	0,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20.595.090	0	20.590.524	0	0,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8.820.000	0	13.860.000	0	-0,36
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	127.660.000	0	100.300.000	0	0,27
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9.146.249	0	1.208.720	0	6,57
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59.239.560	0	63.802.020	0	-0,07
511129	Belanja Uang Makan PNS	120.308.000	0	134.222.000	0	-0,10
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	119.475.000	0	121.600.000	950.000	-0,02
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19.185.000	1.480.000	20.665.000	0	-0,07
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1.620.936.122	1.481.144	1.583.025.545	950.284	0,02
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	64.072.000	0			1,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.212	0			1,00
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.407.200	0			1,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.281.440	0			1,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.025.000	0			1,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.345.200	0			1,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	7.992.000	0			1,00
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	6.800.000	0			1,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	93.924.052	0	0	0	1,00
5122	Belanja Lembur					
512211	Belanja Uang Lembur	48.207.000	0	33.122.000	0	0,31
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4.215.000	0			1,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	52.422.000	0	33.122.000	0	0,37
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai					
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan)	1.440.672.259	0	1.289.413.363		0,10
512414	Belanja Pegawai Tunjangan	80.250.135	0			1,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	1.520.922.394	-	1.289.413.363		0,15
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3.288.204.568	1.481.144	2.905.560.908	950.284	0,12

Tahun anggaran 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp1.481.144, sehingga realisasi bersih atau realisasi Netto sebesar Rp3.286.723.424. Adanya pengembalian tersebut merupakan rincian dari :

- Pengembalian belanja pada Akun 511119 merupakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS sebesar Rp1.144 pengembalian ini melalui potongan SPM.
- Pengembalian belanja pada Akun 511151 merupakan pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp1.480.000. Nilai tersebut merupakan pengajuan SPM Potongan atas nama Fajar Adi Purnama, akan tetapi pengajuan tersebut atau nilai tersebut masuk dalam jenis belanja

pengembalian.

Adanya peningkatan realisasi pada belanja 51 tersebut bila dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya pembayaran gaji 13 dan 14 serta tukin 13 dan 14 dibayarkan 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, pembayaran gaji 13 dan 14 serta Tukin 13 dan 14 hanya 50 %.

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp5.905.659.459*

Realisasi Belanja Barang untuk periode sampai dengan per 30 September TA 2024 dan per 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp dan Rp5.905.659.459 dan Rp3.843.961.383. Realisasi Belanja Barang per 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35% dari Realisasi Belanja Barang per 30 September TA 2023. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi pada belanja barang untuk kegiatan teknis dan operasional perkantoran.

Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2024 dan 30 September 2022.

Kode Akun	Uraian	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2023		Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi	Pengembalian	Realisasi	Pengembalian	
5211	Belanja Barang Operasional	289.569.638,	0,	741469.226,	0,	(156)
5212	Belanja Barang Non Operasional	612.849.297,	0,	335.964.704,	0,	0,45
5213	Belanja Barang Persediaan	55.237.203,	0,	55.767.040,	0,	(0,01)
5221	Belanja Jasa	1269.291.226,	0,	324.162.932,	0,	0,74
5231	Belanja Pemeliharaan	239.694.413,	0,	244.739.587,	0,	(0,02)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.655.973,	9.507.731,	1861857.894,	0,	0,41
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemd	294.005.700,	0,	280.000.000,	0,	0,05
TOTAL		5.916.167.190,	9.507.731,	3.843.961.383,	0,	0,35
TOTAL NETTO		5.906.659.459,		3.843.961.383,		0,35

Adanya pengembalian pada belanja 52 dikarenakan kelebihan pembayaran dan telah dilakukan pengembalian dengan mengajukan Surat Pernyataan Koreksi Atas Realisasi Anggaran Belanja Negara dengan rincian diantaranya :

1. Surat Pernyataan Koreksi Atas Realisasi Anggaran Belanja

- Negara Nomor : B.66/LPSPL.1/PKRL/KU.110/VIII/2024 dengan besaran nilai pengembalian sebesar Rp7.267.731
2. Surat Pernyataan Koreksi Atas Realisasi Anggaran Belanja Negara Nomor : B.68/LPSPL.1/PKRL/KU.110/IX/2024 dengan besaran nilai pengembalian sebesar Rp2.240.000

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 September TA 2024 dan Per 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat alokasi belanja bantuan sosial pada Loka PSPL Sorong.

B.6 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 September 2024 dan Per 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Per 30 September TA 2024 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 30 September TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembelian tanah dikantor Loka PSPL Sorong TA. 2024 tidak mendapatkan alokasi belanja modal tanah.

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp280.909.159

Realisasi Belanja Modal per 30 September TA 2024 dan per 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp280.909.159 dan Rp56.876.400. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 30 September TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,80% (persen) bila dibandingkan dengan periode 30 September TA 2023. Peningkatan realisasi tersebut dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran

PNBP (Belanja Modal).

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 September TA 2024 dan 30 September 2023.

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.909.159	56.876.400	0,80
Jumlah Belanja Kotor	280.909.159	56.876.400	0,80
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	280.909.159	56.876.400	0,80

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0

Loka PSPL Sorong Per 30 September TA 2024 dan Per 30 September TA 2023 tidak memiliki alokasi belanja modal Gedung dan bangunan.

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

Loka PSPL Sorong per 30 September TA 2024 dan Per 30 September TA 2023 tidak memiliki alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

B.10 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0

Realisasi Belanja Modal 30 September TA 2024 dan 30 September TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal per 30 September TA 2024 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal pada periode yang sama yaitu periode 30 September TA 2023 Rp0. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan pembelian belanja modal lainnya.

B.II DIPA Awal dan Revisi Anggaran

Revisi Dipa

Pada DIPA Awal Tahun 2023 Loka PSPL Sorong memperoleh anggaran Rp13.333.073.000, DIPA Awal disahkan pada tanggal 24 November 2024. Dalam kurung waktu periode dari

Januari-Juni 2024 terjadi beberapa kali revisi diantaranya :

Revisi Ke I :

Terbit pada tanggal yang diperuntukan untuk mengakomodir anggaran yang di blokir (automatic adjustment) sebesar Rp600.000.000 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 23 Desember Nomor : S-1082/MK.02/2023 Perihal automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Revisi Ke II :

Revisi tersebut untuk melakukan penyesuain RPD (Rencana Penarikan Dana) yang bertujuan untuk menunjang nilai IKPA.

Revisi Ke III :

Revisi tersebut dalam rangka adanya penambahan Pegawai P3K.

Revisi IV :

Revisi tersebut merupakan penyesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), RPD dan penyesuain Lokasi (kegiatan teknis)

Revisi V :

Revisi tersebut diperuntukan untuk pengoptimalisasi anggaran yang yang pelaksanaannya kegiatan telah mencapai 100 % akan tetapi tidak terserap penuh. Adanya sisa anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan lainnya pada KRO dan RO yang sama serta diperuntukan untuk penyesuaian RPD yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IKPA pada aspek Perencanaan

Revisi VI :

Revisi tersebut merupakan pembukaan blokir anggaran yang

Revisi VII :

Revisi tersebut merupakan revisi penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)

Revisi VIII

Revisi ke delapan merupakan revisi terkait penambahan pagu Lutra yang merupakan sumber anggaran dari Pinjaman Luar Neger (PLN) yang pagu Dipa terbit pada tanggal 22 Agustus. Penambahan pagu senilai Rp4.120.818.000 mengakibatkan terjadi perubahan pagu yang semula Rp13.333.073.000 menjadi 17.553.891.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp1.008.481.2
28*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp Rp1.008.481.228 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP yang digunakan untuk kegiatan oprasional satker. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. UP RM
2. UP PNBP
3. TUP PNBP
4. TUP PHLN

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
Dan Setara Kas
Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran

yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	30 September Tahun 2024	30 September Tahun 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0

Saldo Piutang PNPB per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp639.000 dan Rp24.786.717 Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	Per 30 September 2024	Per 30 September 2023
Piutang Bukan Pajak	639.000	24.786.717
Piutan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Nilai Piutang Bukan Pajak merupakan nilai yang diperoleh untuk pemotongan gaji yang diperuntukan untuk pembayaran penggunaan rumah negara atau Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang sudah di SPM kan dan akan diakui pada awal bulan berikutnya.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Piutang Jangka
Pendek Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp(123.934). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar dimuka*

per tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja

Rp0

Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada Loka PSPL Sorong tidak terdapat belanja yang dibayar dimuka.

C.9 Persediaan

*Persediaan
Rp435.000*

Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 240.000 dan Rp435.000. Persediaan periode 30 September 2024 merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 30 September 2024 adalah sebesar Rp435.000, berupa pembelian kertas HVS.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar

Penjualan
Angsuran
Rp0

Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
piutang
Tak t
Teretagh-
piutang
jangka
panjang
Rp0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.13 Tanah

Tanah
Rp10.279.2
65.000

Tanah yang atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Kelautan dan Perikanan Loka PSPL Sorong per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing seluas 10.000 m2 dengan nilai sebesar Rp10.279.165.000 dan Rp 10.279.165.000.

No	Luas Lahan	Lokasi	Nilai (Rp)
1.	10.000 m2	Kpr.PDAM Km 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong	10.279.265.000

C14. Peralatan Dan Mesin

*Peralatandan Mesin
Rp6.714.396.000*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah Rp6.714.396.000 dan Rp6.433.486.841. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	6.433.486.841
Mutasi tambah:	-
Revaluasi Aset	
Koreksi pencatatan	
Mutasi kurang:	-
Penghapusan Aset	-
Koreksi pencatatan	
Saldo per 30 September 2024	6.748.391.617
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	(33.995.617)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	6.714.396.000

Nilai pengurangan tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk terhadap item barang berupa Kamera Digital dengan nomor surat (terlampir) : B. 001/LPSPL.1/PL.750/VII/2024 seniali Rp33.995.617.

C.15 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah Rp8.372.409.039 dan Rp8.203.769.039 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Gedung dan
Bangunan
Rp8.372.409.039*

Saldo per 31 Desember 2023	8.372.409.000
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	-
Revaluasi Aset	
Koreksi pencatatan	
Mutasi kurang:	-
Penghapusan Aset	-
Koreksi pencatatan	
Saldo per 30 September 2024	8.372.409.039
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	8.372.409.039

C.16 Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan per 30 September 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.142.940.000 dan Rp 1.142.940.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Jalan dan
Jembatan,
Rp1.142.940.000*

Saldo per 31 Desember 2022	1.142.940.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 September 2024	1.142.940.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	
Nilai Buku per 30 September 2024	1.142.940.000

C.17 Irigasi

Jalan dan Jembatan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 259.230.000 dan Rp Rp259.230.000 dengan rincian sebagai berikut :

*Irigasi
Rp259.230.000*

Saldo per 31 Desember 2023	259.230.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 September 2024	259.230.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	
Nilai Buku per 30 September 2024	259.230.000

C.18 Jaringan

Nilai asset jaringan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 125.357.000 dan Rp125.357.000 dengan rincian sebagai berikut :

Jaringan
Rp125.357.000

Saldo per 31 Desember 2023	125.357.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 September 2024	125.357.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	
Nilai Buku per 30 September 2024	125.357.000

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah Rp63.316.000 dan Rp63.316.000. Aset tetap tersebut berupa album peta. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk per 30 September Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp63.316.000

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	63.316.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 September 2024	63.316.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	0
Nilai Buku per 30 September 2024	63.316.000

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September tahun 2023 dan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(33.995.617)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing Rp(33.995.617) dan Rp(979.204.900). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September TA 2024

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan (-)	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	6.748.391.617	33.995.617	6.714.396.000
Gedung dan Bangunan	8.372.409.039	0	8.372.409.039
Jalan dan Jembatan	1.142.940.000	0	1.142.940.000
Irigasi	259.230.000	0	259.230.000
Jaringan	125.357.000	0	125.357.000
Aset Tetap Lainnya	63.316.000	0	63.316.000
Akumulasi Penyusutan	16.711.643.656	33.995.617	16.677.648.039

C.22 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Pengelolaan tidak terdapat saldo ATB.

C.23 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Pada Satker Loka PSPL Sorong sampai dengan periode 30 September 2024 tidak terdapat saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan.

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp136.840.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp136.840.000 dan Rp120.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp145.342.791*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp145.342.791 dan Rp6.945.006. Nilai tersebut SPM yang diajukan bulan September, namu SP2D keluarnya bulan Oktober terkait kuitansi UP yang belum direalisasikan atau belum dibuatkan SPM

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing - masing sebesar Rp18.579.263 dan Rp0.

ditagihkan Rp0

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi merupakan UP PNB

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima dimuka
Rp0*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2024 dan 30 September 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.25 Ekuitas

Ekuitas Rp

Ekuitas per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.794.337.486 dan Rp20.184.665.771 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.190.483.953. Pendapatan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan PNBPNP
Rp1.190.483.953*

Rincian Realisasi Pendapatan

Kode	Uraian	Realisasi Per 30 September 2024		
		Target	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6.239.400	#DIV/0!
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	154.845.000	241.110.000	155,71
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	945.155.000	943.134.553	99,79
	Jumlah	1.100.000.000	1.190.483.953	108,23

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode Triwulan III, jika dibandingkan antara Laporan Operasional senilai Rp1.190.483.953 Rp dan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp1.217.849.750Triwulan III maka terdapat selisih nilai adalah Rp.27.368.799. Selisih tersebut diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp28.004.797 dan potongan sewa dinas bulan oktober dianggap sebagai realisasi dengan nilai Rp639.000. Sehingga nilai yang diperoleh adalah Rp28.004.797 dikurang Rp639.000, maka nilainya adalah Rp27.368.797 yang merupakan nilai selisih antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

D.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 3.425.566.215

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September TA 2024 dan Per 30 September 2023 adalah masing masing Rp3.425.566.215 dan Rp 3.033.925.931. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil. Ada perbedaan nilai selisih antara Laporan Operasional Rp Rp3.425.566.215 dengan nilai pada Laporan Realisasi Anggaran Rp3.286.723.424. Terdapat selisih Rp138.843.529 yang merupakan nilai dari gaji pokok PNS dan P3K, tunjangan lainnya diluar Tunjangan Kinerja yang SPMnya Bulan September dan penerbitan SP2Dnya Bulan berikutnya (Oktober)

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 September Tahun 2024 dan 30 September Tahun 2023

Urain Belanja Pegawai	Realisasi		%
	2024	2023	
Beban Gaji	1.277.815.072	1.170.391.374	0,09
Beban Tunjangan - Tunjangan	2.095.329.143	1.830.412.557	0,14
Beban Honorarium dan Vakasi			#DIV/0!
Beban Lembur	52.422.000	33.122.000	0,58
TOTAL	3.425.566.215	3.033.925.931	0,13

D.3 Beban Persediaan Konsumsi

*Beban
Persediaan
Konsumsi
Rp55.432.203*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.432.203 dan Rp55.416.797. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.183.151.155*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 September Tahun 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.183.151.155 dan Rp1.483.561.651. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa barang konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp253.671.130*

Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp253.671.130 dan Rp258.958.767. Bila dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah selisih. Selisih tersebut adalah pada Laporan Operasional Senilai Rp253.671.130 dan Laporan Realisasi Anggaran Rp239.694.413 maka selisihnya adalah Rp 13.976.717 yang merupakan pengembaliab Beban Pemeliharaan gedung perkantoran yang merupakan temuan BKP dan telah

ditindaklanjuti.

Realisasi Pemeliharaan 30 September 2024 dan 30 September 2023.

Akun	Uraian Jenis Beban	Per 30 September 2024	Per 30 September 2023	Naik/Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung bangunan dan mesin	75.259.549	121.958.342	-0,38
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.411.581	137.000.425	0,30
TOTAL		253.671.130	258.958.767	-0,02

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi gedung bertingkat dan tidak bertingkat diantaranya

1. Pengecetan bangunan bertingkat dan tidak bertingkat
2. Pergantian plafon bagian depan
3. Perbaikan toilet
4. Perbaikan atap
5. Pengecetan atap

pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi:

1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, digunakan untuk pembebanan biaya servis rutin kendaraan roda 4, pembelian BBM operasional serta pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.
2. Pemeliharaan Peralatan Survei, digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan peralatan survey seperti perawatan peralatan selam, perawatan kompresor selam, serta tools lain seperti GPS, perbaikan dive watch.
3. Pemeliharaan peralatan CCTV kantor.
4. Pemeliharaan kendaraan roda 4 double gardan pada Kantor Loka PSPL Sorong meliputi servis rutin, BBM operasional, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

5. Pemeliharaan kendaraan roda 2, berupa servis rutin dan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.
6. Pemeliharaan besi bagian atas Kapal dan Dek
7. Pemeliharaan Speed Boat Kantor berupa servis rutin, docking dan pemeliharaan mesin dan bagian speed boat lainnya.
8. Pemeliharaan computer meliputi perbaikan dan servis computer, penggantian part yang rusak.
9. Pemeliharaan Laptop berupa pemeliharaan rutin laptop kantor
10. Pemeliharaan AC pada kantor BKKPN beserta wilker yang tersebar didalamnya.
11. Pemeliharaan printer berupa servis rutin printer yang terdapat di UPT Sorong dan Wilker.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.163.515.245*

Beban Perjalanan Dinas Per 30 September Tahun 2024 dan 30 September 2023 adalah masing masing sebesar Rp3.163.515.245 dan Rp1.882.694.689. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Jenis Beban	Per 30 September 2024	Per 30 September 2023	Naik/Turun (%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	1.765.802.110	1.639.954.104	0,08
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147.885.000	74.440.000	0,99
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	388.766.035	21.150.000	17,38
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Luar Kota	861.062.100	147.150.585	4,85
	TOTAL	3.163.515.245	1.882.694.689	0,68

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

*Beban Barang
Untu Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp294.005.700*

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 30 September 2024 Tahun dan 30 September Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.005.700 dan Rp280.000.000 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Realisasi pengadaan barang terkait Pemberian Bantuan Pemerintah (BP) sampai dengan periode 30 September 2024, Loka PSPL Sorong telah memberikan Bantuan Pemerintah untuk 3 kelompok. Rincian pemberian tersebut untuk kelompok :

Rincian Pemberian Bantuan Pemerintah (Bamper) Per 30 September 2024.

Nomor BAST	Wilayah	Nama Kelompok	Nilai BP
Nomor : B.640/LPSPL.1/PRL.440/VI/2024	Papua Barat	Katora Jaya	97.485.750
Nomor : B.776/LPSPL.1/PRL.440/VII/2024	Maluku Utara	Sebelei	98307150
Nomor : B.716/LPSPL.1/PRL.440/VII/2024	Maluku Utara	Bangkit Sehati	98212800
TOTAL			294.005.700

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial 30 September Tahun 2024 dan 30 September 2023 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
Amortisasi
Rp490.891.503*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing Rp490.891.503 dan senilai Rp424.975.817

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Tak Tertagih
Rp(123.934)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September Tahun 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp123.934 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan temuan atas pemeriksaan BPK atas nilai 5 permil dari temuan Honor Narasumber danm Pemeliharaan Kantor.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 September Tahun 2024 dan 30 September Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Non Operasional
Rp0*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 September Tahun 2024 dan 31 September Tahun 2023.

Rincian Non Operasional

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja TA Yang Lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
Selisih Kurs	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 September Tahun 2024 dan 30 September Tahun 2023 adalah Rp0

D.14. Beban Pelepasan Aset

*Beban
Pelepasan Rp0*

Beban pelepasan asset pada periode 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp20.184.665.771*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.184.665.771 dan Rp19.741.533.906

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp(8.647.620.467
)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp(8.647.620.467) dan Rp(6.436.853.612). Adanya selisih penyusutan yang berpengaruh pada LO yang memengaruhi ekuitas akhir. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang indikasinya terdapat penyusutan nilai asset henti guna.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

*Koreksi yang
menambah/m
mengurangi Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp845.890*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp845.890 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.5. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi Rp0*

Koreksi nilai asset tetap periode 30 September 2024 dan 30 September 2024 adalah Rp845.890 dan Rp27.184.065. Nilai koreksi aset non revaluasi tersebut merupakan aset untuk item kamera, setelah dirubah, nilainya juga berubah dikarenakan pencatan dan mesin berupa kamera digital.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar Entitas
Rp8.256.442.292*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.256.442.292 dan Rp5.820.017.367. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp19.794.337.486*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.794.337.486 dan Rp9.183.386.788.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA.

Program Perioritas Nasional (PN)

Program Nasional (PN) pada Loka PSPL Sorong adalah program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.

Rincian Kegiatan Prioritas Nasional

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)		
				Pagu	Realisasi*	%	Target	S.d Bulan Ini	
								RVRO	PCRO (%)
1	2362	QEH001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	430.000.000	391.002.731	90,93	3	3	100
2	2362	UBA001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	-	0	1	0	15
3	2362	REB001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	600.000.000	423.703.247	70,62	4	3	79
4	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	970.000.000	730.044.880	75,26	1	0	78
5	2363	PBW002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	50.000.000	5.871.000	11,74	1	0	71
6	2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000	19.747.866	39,5	1	0	65
7	2362	REB002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	850.000.000	607.018.322	71,41	2	0	78
8	2362	PEC001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000	30.403.343	43,43	1	1	100
9	4346	QDD001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800.000.000	699.414.986	87,43	4	4	100
TOTAL PAGU PRIORITAS NASIONAL				3.920.000.000	2.907.206.375	74,16			

Jurnal Balik

Telah dilakukan jurnal balik

- Jurnal balik Listrik, Telkom dan Indihome yang keseluruhan nilainya sebesar Rp6.945.006
- Jurnal balik atas temuan BPK senilai Rp24.786.717

- Jurnal balik 5 permil atas temuan BPK senilai Rp123.934

Penetapan Akun PIPK

- Penetapan Akun signifikan pada Loka PSPL Sorong merupakan tindaklanjut dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 992/SJ.2/TU.210/IV/2024 Tentang Penetapan Akun Signifikan Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal PKRL diantaranya :
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - b. Belanja Bahan
 - c. Peralatan dan Mesin
 - d. PNBP
 - e. Persediaan diserahkan Ke Masyarakat
 - f. Persediaan (Umum)

Temuan Itjen dan BPK

- a. Pengembalian terhadap base camp tenaga kerja kontruski rehab kantor senilai Rp2.500.000 yang tertuang Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 dan telah ditinklanjuti dengan melakukan setoran ke Kas Negara dengan Bukti NTP pada tanggal 13 Februari 2024 dengan kode billing 820240212453056
- b. Pengembalian terhadap Kelebihan pembayaran jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp718.080 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 dan telah ditinklanjuti dengan melakukan setoran ke Kas Negara dengan Bukti NTP Bukti NTP pada tanggal 13 Februari 2024 dengan kode billing 820240212453056
- c. Pengembalian terhadap realisasi belanja pemeliharaan pada

LPSPL Sorong yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717 dan juga Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan senilai Rp10.810.000. Nilai tersebut merupakan temuan yang tertuang dalam surat temuan BPK Nomor : 35/KKP/LK-KKP/04/2024, perihal Penyampian Konsep Temuan BPK, tanggal 03 April 2024. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara melalui kantor dengan resi penyetoran Kode Billing 8202404045714977.

Pagu Anggaran Pinjaman Luar Negeri

Pagu Anggaran Pinjaman Luar Negeri LAUTRA (Loan Allocation for the Utilization of Aquatic Resources) merujuk pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendanai proyek-proyek terkait sumber daya laut melalui pinjaman luar negeri. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berdaya saing, terutama di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Annual Work Plan (AWP) adalah rencana kerja tahunan yang disusun oleh suatu kementerian atau lembaga sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun tertentu. Dalam konteks LAUTRA, AWP akan mencakup rincian program, target, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. AWP membantu memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal, efisien, dan sesuai dengan sasaran strategis kementerian.

AWP akan menyertakan beberapa aspek penting seperti:

1. Program dan Kegiatan: Daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

2. Target dan Indikator Kinerja: Tujuan spesifik yang ingin dicapai, beserta indikator kinerja untuk mengukur pencapaiannya.
3. Sumber Pembiayaan: Sumber dana yang digunakan, termasuk dana dari pinjaman luar negeri seperti LAUTRA.
4. Jadwal Pelaksanaan: Rincian waktu pelaksanaan setiap kegiatan dalam satu tahun anggaran.
5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi: Prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Penggunaan pinjaman luar negeri untuk program seperti LAUTRA biasanya ditujukan untuk mendanai proyek besar yang membutuhkan teknologi atau infrastruktur, seperti pengembangan kawasan perikanan, pembangunan pelabuhan, atau peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir.

Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN untuk UPT Loka PSPL Sorong sebesar Rp 4.120.818.000 yang peruntukan untuk kegiatan pengawasan untuk tidaklanjut updating Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di KKPD Kei Kecil (Maluku), Babar (Maluku), Mare (Maluku Utara) dan Raja Ampat (Papua Barat Daya. Dan periode sampai dengan 31 September belum ada realisasi sumber anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Capaian Output

Pada periode sampai dengan 30 September 2024 telah dilakukan pengisian Caput/Capaian Output 100% pada kegiatan 2362, 2363,4346 dan 2367 dengan realisasi Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran adalah 95,23 % (terlampir)

Sumber Anggaran

Sumber Anggaran pada DIPA Loka PSPL Sorong ada dari 3 sumber jenis diantaranya, Rupiah Murni (RM), PNBPN dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	4.588.366.000	3.286.723.424	71,63
Belanja Barang	7.072.707.000	4.978.900.560	70,40
Belanja Modal	332.000.000	151.184.009	45,54
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	11.993.073.000	8.416.807.993	70,18
Sumber Anggaran PNBPN			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.210.000.000	927.758.899	76,67
Belanja Modal	130.000.000	129.725.150	99,79
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	1.340.000.000	1.057.484.049	78,92
Sumber Anggaran PLN			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	3.431.418.000	0	0
Belanja Modal	689.400.000	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	4.120.818.000	0	0,00
TOTAL AKUMULASI	17.453.891.000	9.474.292.042	54,28

Sumber anggaran yang melekat tersebut diperuntukan untuk pelaksanaan Kegiatan meliputi yang mendukung kegiatan teknis maupun manajerial yang melekat pada UPT Loka PSPL Sorong. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut
- b. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
- c. Perencanaan Ruang Laut
- d. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
- e. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran

NO	Kode	Nama Kegiatan	Total		
			Pagu	Real	%
1	2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	6.820.818.000	1.839.898.697	26,97
2	2362	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	50.000.000	5.871.000	11,74
3	23366	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000	859.770.030	78,16
4	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.683.073.000	6.069.337.329	69,90
5	4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000	699.414.986	87,43
TOTAL			17.453.891.000	9.474.292.042	54,28

LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 07
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 477440

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
PAPUA BARAT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl. Cetak 09/10/2024 8:51 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	24,786,717	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	123,934
0.0	117111	Barang Konsumsi	435,000	0
0.0	131111	Tanah	10,279,165,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,433,486,841	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,372,409,039	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,142,940,000	0
0.0	134112	Irigasi	259,230,000	0
0.0	134113	Jaringan	125,357,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	63,316,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,501,767,852
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,149,742,276
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	592,633,575
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	233,907,938
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	31,339,245
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	6,945,006
0.0	391111	Ekuitas	0	20,184,665,771
JUMLAH			26,701,125,597	26,701,125,597

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:22 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 8:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,008,481,228	0	1,008,481,228	0.00
Piutang Bukan Pajak	639,000	24,786,717	(24,147,717)	(97.42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(123,934)	123,934	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	639,000	24,662,783	(24,023,783)	(97.41)
Persediaan	240,000	435,000	(195,000)	(44.83)
JUMLAH ASET LANCAR	1,009,360,228	25,097,783	984,262,445	3,921.71
ASET TETAP				
Tanah	10,279,165,000	10,279,165,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,714,396,000	6,433,486,841	280,909,159	4.37
Gedung dan Bangunan	8,372,409,039	8,372,409,039	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,527,527,000	1,527,527,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	63,316,000	63,316,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,999,432,499)	(6,509,390,886)	(490,041,613)	7.53
JUMLAH ASET TETAP	19,957,380,540	20,166,512,994	(209,132,454)	(1.04)
JUMLAH ASET	20,966,740,768	20,191,610,777	775,129,991	3.84
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	145,342,791	6,945,006	138,397,785	1,992.77
Utang Yang Belum Ditagihkan	18,579,263	0	18,579,263	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,008,481,228	0	1,008,481,228	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,172,403,282	6,945,006	1,165,458,276	16,781.24
JUMLAH KEWAJIBAN	1,172,403,282	6,945,006	1,165,458,276	16,781.24
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,794,337,486	20,184,665,771	(390,328,285)	(1.93)
JUMLAH EKUITAS	19,794,337,486	20,184,665,771	(390,328,285)	(1.93)
JUMLAH EKUITAS	19,794,337,486	20,184,665,771	(390,328,285)	(1.93)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,966,740,768	20,191,610,777	775,129,991	3.84

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO
NIP 198201312005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 8:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	135,840,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	872,641,228	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	639,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	240,000	0
0.0	131111	Tanah	10,279,165,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,714,396,000	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,372,409,039	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,142,940,000	0
0.0	134112	Irigasi	259,230,000	0
0.0	134113	Jaringan	125,357,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	63,316,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,844,427,183
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,241,007,390
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	638,220,773
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	242,348,625
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	33,428,528
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	138,842,791
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	6,500,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	18,579,263
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,008,481,228
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,474,292,042
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,217,849,750	0
0.0	391111	Ekuitas	0	20,184,665,771
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	849,890
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,239,400
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	241,110,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	943,134,553
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,004,797
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,161,030,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,885	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72,664,830	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,396,740	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,180,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	138,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,162,022	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	64,381,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	120,308,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	132,175,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 8:57 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,365,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	70,479,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,340	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,047,920	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,409,584	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,300,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,779,720	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,992,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	7,650,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	48,207,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,215,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,440,672,259	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	80,250,135	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	204,117,352	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,645,656	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,768,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	34,538,630	0
3.0	521211	Beban Bahan	599,217,297	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	13,760,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	44,022,562	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,598,454	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37,634,455	0
3.0	522141	Beban Sewa	243,099,197	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	74,270,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	873,479,052	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,259,549	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,411,581	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,765,802,110	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,885,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	388,766,035	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	861,062,100	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	343,509,221	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	91,265,114	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	45,587,198	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	8,440,687	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,089,283	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,432,203	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	294,005,700	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 8:57 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	123,934
JUMLAH			39,050,256,168	39,050,256,168

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO

NIP 198201312005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:22 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 9:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,474,292,042
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,217,849,750	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,600,400
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	241,110,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	943,134,553
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,004,797
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,069,561,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,713	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	66,927,010	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,595,090	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,820,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	127,660,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,146,249	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59,239,560	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	120,308,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	119,475,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,185,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	64,072,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,212	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,407,200	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,281,440	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,025,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,345,200	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,992,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	6,800,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	48,207,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,215,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,440,672,259	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	80,250,135	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	197,617,352	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,645,656	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,768,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	34,538,630	0
3.0	521211	Belanja Bahan	599,089,297	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,760,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55,237,203	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	48,560,408	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,744,754	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:22 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 9:01 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	39,895,315	0
3.0	522141	Belanja Sewa	242,181,197	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	63,460,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	873,449,052	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61,282,832	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178,411,581	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,757,806,578	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,885,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	388,766,035	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	861,062,100	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	294,005,700	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280,909,159	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,144
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,480,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	9,507,731
JUMLAH			10,703,130,667	10,703,130,667

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO

198201312005021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG 477440

Tgl Data : 09/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 09/10/24 9:49 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17,453,891,000	9,474,292,042	(7,979,598,958)	54	14,392,004,000	6,805,448,407	7,586,555,593	47
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO
NIP 198201312005021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 477440
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
PAPUA BARAT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/10/24 9:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 9/10/24 7:38 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,774,954,000	1,417,324,000	1,069,561,500	0	1,069,561,500	75.46	347,762,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	27,000	18,713	1,144	17,569	69.31	9,431
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	84,700,000	86,430,000	66,927,010	0	66,927,010	77.43	19,502,990
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30,092,000	27,096,000	20,595,090	0	20,595,090	76.01	6,500,910
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	12,600,000	8,820,000	0	8,820,000	70	3,780,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	160,000,000	165,460,000	127,660,000	0	127,660,000	77.15	37,800,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,202,000	9,627,000	9,146,249	0	9,146,249	95.01	480,751
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	90,258,000	76,975,000	59,239,560	0	59,239,560	76.96	17,735,440
511129	Belanja Uang Makan PNS	110,383,000	196,584,000	120,308,000	0	120,308,000	61.2	76,276,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	146,789,000	162,000,000	119,475,000	0	119,475,000	73.75	42,525,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,655,000	26,205,000	19,185,000	1,480,000	17,705,000	73.21	8,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,488,753,000	2,180,328,000	1,620,936,122	1,481,144	1,619,454,978	74.34	560,873,022
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	42,000,000	86,851,000	64,072,000	0	64,072,000	73.77	22,779,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,000	3,000	1,212	0	1,212	40.4	1,788
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,200,000	13,486,000	6,407,200	0	6,407,200	47.51	7,078,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,120,000	3,898,000	1,281,440	0	1,281,440	32.87	2,616,560
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,700,000	5,800,000	3,025,000	0	3,025,000	52.16	2,775,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,000,000	9,042,000	4,345,200	0	4,345,200	48.06	4,696,800
511628	Belanja Uang Makan PPPK	12,320,000	11,218,000	7,992,000	0	7,992,000	71.24	3,226,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	6,100,000	10,250,000	6,800,000	0	6,800,000	66.34	3,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	80,461,000	140,548,000	93,924,052	0	93,924,052	66.83	46,623,948
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	84,816,000	84,816,000	48,207,000	0	48,207,000	56.84	36,609,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	11,100,000	4,215,000	0	4,215,000	37.97	6,885,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	84,816,000	95,916,000	52,422,000	0	52,422,000	54.65	43,494,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,869,836,000	2,050,644,000	1,440,672,259	0	1,440,672,259	70.25	609,971,741
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	64,500,000	120,930,000	80,250,135	0	80,250,135	66.36	40,679,865
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,934,336,000	2,171,574,000	1,520,922,394	0	1,520,922,394	70.04	650,651,606
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,588,366,000	4,588,366,000	3,288,204,568	1,481,144	3,286,723,424	71.66	1,301,642,576
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 477440
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
PAPUA BARAT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/10/24 9:53 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 9/10/24 7:38 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,011,845,000	306,748,000	197,617,352	0	197,617,352	64.42	109,130,648
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,400,000	4,200,000	1,645,656	0	1,645,656	39.18	2,554,344
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	133,872,000	112,248,000	55,768,000	0	55,768,000	49.68	56,480,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	60,000,000	54,000,000	34,538,630	0	34,538,630	63.96	19,461,370
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,214,117,000	477,196,000	289,569,638	0	289,569,638	60.68	187,626,362
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,035,095,000	1,663,313,000	599,089,297	0	599,089,297	36.02	1,064,223,703
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	40,560,000	94,320,000	13,760,000	0	13,760,000	14.59	80,560,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,095,655,000	1,769,633,000	612,849,297	0	612,849,297	34.63	1,156,783,703
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,000,000	60,600,000	55,237,203	0	55,237,203	91.15	5,362,797
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,000,000	60,600,000	55,237,203	0	55,237,203	91.15	5,362,797
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	84,000,000	73,200,000	48,560,408	0	48,560,408	66.34	24,639,592
522112	Belanja Langganan Telepon	7,200,000	7,200,000	1,744,754	0	1,744,754	24.23	5,455,246
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	50,300,000	76,220,000	39,895,315	0	39,895,315	52.34	36,324,685
522141	Belanja Sewa	451,588,000	1,015,306,000	242,181,197	0	242,181,197	23.85	773,124,803
522151	Belanja Jasa Profesi	378,700,000	82,700,000	63,460,500	0	63,460,500	76.74	19,239,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	64,832,000	1,329,857,000	873,449,052	0	873,449,052	65.68	456,407,948
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,036,620,000	2,584,483,000	1,269,291,226	0	1,269,291,226	49.11	1,315,191,774
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321,493,000	272,572,000	61,282,832	0	61,282,832	22.48	211,289,168
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	353,373,000	255,415,000	178,411,581	0	178,411,581	69.85	77,003,419
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	674,866,000	527,987,000	239,694,413	0	239,694,413	45.4	288,292,587
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,445,325,000	4,343,549,000	1,757,806,578	9,507,731	1,748,298,847	40.47	2,595,250,153
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203,120,000	264,140,000	147,885,000	0	147,885,000	55.99	116,255,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89,100,000	402,651,000	388,766,035	0	388,766,035	96.55	13,884,965
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,169,904,000	983,886,000	861,062,100	0	861,062,100	87.52	122,823,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,907,449,000	5,994,226,000	3,155,519,713	9,507,731	3,146,011,982	52.64	2,848,214,018
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 477440
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
PAPUA BARAT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 09/10/24 9:53 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 9/10/24 7:38 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	300,000,000	300,000,000	294,005,700	0	294,005,700	98	5,994,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	300,000,000	300,000,000	294,005,700	0	294,005,700	98	5,994,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,282,707,000	11,714,125,000	5,916,167,190	9,507,731	5,906,659,459	50.5	5,807,465,541
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	462,000,000	1,151,400,000	280,909,159	0	280,909,159	24.4	870,490,841
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	462,000,000	1,151,400,000	280,909,159	0	280,909,159	24.4	870,490,841
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	462,000,000	1,151,400,000	280,909,159	0	280,909,159	24.4	870,490,841
	JUMLAH BELANJA	13,333,073,000	17,453,891,000	9,485,280,917	10,988,875	9,474,292,042	54.34	7,979,598,958

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 477440

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
PAPUA BARAT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/10/24 9:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425131	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,600,400	0	5,600,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	5,600,400	0	5,600,400	
4252 425259	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum Pendapatan Perizinan Lainnya	154,845,000	241,110,000	0	241,110,000	155.71
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	154,845,000	241,110,000	0	241,110,000	155.71
4256 425629	Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	945,155,000	943,134,553	0	943,134,553	99.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	945,155,000	943,134,553	0	943,134,553	99.79
4259 425912	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,004,797	0	28,004,797	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	28,004,797	0	28,004,797	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,100,000,000	1,217,849,750	0	1,217,849,750	110.71
	JUMLAH PENDAPATAN	1,100,000,000	1,217,849,750	0	1,217,849,750	110.71

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 09/10/24 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,190,483,953	977,942,740	212,541,213	21.734
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,190,483,953	977,942,740	212,541,213	21.734
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,190,483,953	977,942,740	212,541,213	21.734
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,425,566,215	3,033,925,931	391,640,284	12.909
Beban Persediaan	55,432,203	55,416,797	15,406	0.028
Beban Barang dan Jasa	2,183,151,155	1,483,561,651	699,589,504	47.156
Beban Pemeliharaan	253,671,130	258,958,767	(5,287,637)	(2.042)
Beban Perjalanan Dinas	3,163,515,245	1,882,694,689	1,280,820,556	68.031
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	294,005,700	280,000,000	14,005,700	5.002
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:36 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 11:19 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	490,891,503	424,975,817	65,915,686	15.51
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(123,934)	0	(123,934)	()
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,866,109,217	7,419,533,652	2,446,575,565	32.975
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,675,625,264)	(6,441,590,912)	(2,234,034,352)	34.681
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	4,525,000	(4,525,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	7,650,000	(7,650,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,125,000	(3,125,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28,004,797	212,300	27,792,497	13,091.143
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28,004,797	212,300	27,792,497	13,091.143
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	28,004,797	4,737,300	23,267,497	491.155
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,647,620,467)	(6,436,853,612)	(2,210,766,855)	34.345
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,647,620,467)	(6,436,853,612)	(2,210,766,855)	34.345

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO
NIP 198201312005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (477440) LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Tgl Data : 09/10/24 6:22 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 11:20 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,184,665,771	19,741,533,906	443,131,865	2.24
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,647,620,467)	(6,436,853,612)	(2,210,766,855)	34.35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	849,890	27,184,065	(26,334,175)	(96.87)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	849,890	27,184,065	(26,334,175)	(96.87)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,256,442,292	5,820,017,367	2,436,424,925	41.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(390,328,285)	(589,652,180)	199,323,895	(33.8)
EKUITAS AKHIR	19,794,337,486	19,151,881,726	642,455,760	3.35

Keterangan :

FINAL

Sorong, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRIK SOMBO

NIP 198201312005021001



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : SEPTEMBER satker : 477440

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action		
								Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini											S.d Bulan Ini	
													RVRO	PCRO (%)										RVRO	PCRO (%)
1	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	17,928,000	14,844,560	82.80	1	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	-7.83	00	Non PN	Pada bulan September LPSPL Sorong telah melakukan publikasi pada media sosial			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
2	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	130,000,000	129,725,150	99.79	3	Unit	0.00	0.00	3.0000	100.00	0.21	00	Non PN	Pengadaan telah selesai dilaksanakan			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
3	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	REA004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	4,120,818,000	0	0.00	2,178,611	Hektar	0.00	20.00	0.0000	25.00	25.00	01	Non PN	Telah dilakukan kegiatan patroli di KKD Kei Kecil, Raja Ampat dan Mare			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
4	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	QEH001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	430,000,000	391,002,731	90.93	3	Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	3.0000	100.00	9.07	01	PN	Rapat Persiapan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA 2023			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
5	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	UBA001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,000,000	0	0.00	1	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	5.00	0.0000	15.00	15.00	04	PN	- Koordinasi Rencana Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi Penetapan Kawasan Konservasi Seram Bagian Timur - Rapat koordinasi pembahasan persiapan pelaksanaan survey calon Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

6	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	REB001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	600,000,000	423,703,247	70.62	4	Jenis	0.00	4.00	3.0000	79.00	9.59	01	PN	LPSPS Sorong melaksanakan - Koordinasi terkait rencana kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Rutong - Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang di Negeri Rutong Kota Ambon - Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sorong			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
7	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	128,660,000	110,239,027	85.68	1	Dokumen	0.00	8.33	0.0000	74.97	-10.71	00	Non PN	-Mengumpulkan, menyusun dan mempersiapkan bahan atau data dukung capaian pada bulan September untuk penyusunan laporan kinerja - LPSPS Sorong mengikuti penilaian PLENO SAKIP			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
8	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA962	Layanan Umum	257,464,000	255,055,787	99.06	1	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	-24.09	05	Non PN	Layanan umum bulan September			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
9	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	970,000,000	730,044,880	75.26	1	RekomendasiKebijakan	0.00	10.00	0.0000	78.00	2.74	00	PN	- LPSPS Sorong telah melakukan penilaian teknis sebanyak 12 kali - LPSPS Sorong telah melakukan pengumpulan PULBAKET dan analisis kesesuaian ruang laut sebanyak 1 kali - LPSPS Sorong telah melakukan rapat koordinasi rapat KKPR - LPSPS Sorong melaksanakan Sosialisasi KKPR dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Proposal KKPR Sektor Perikanan			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

10	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBB951	Layanan Sarana Internal	32,000,000	31,581,509	98.69	4	Unit	0.00	0.00	7.0000	100.00	1.31	00	Non PN	Pengadaan telah selesai			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
11	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	SCC002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	300,000,000	257,928,419	85.98	50	Orang	0.00	0.00	0.0000	85.00	-0.98	00	Non PN	Tidak terdapat rencana aksi yang mendukung kegiatan ini			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
12	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2363	PBW002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	50,000,000	5,871,000	11.74	1	RekomendasiKebijakan	0.00	0.00	0.0000	71.00	59.26	04	PN	Pada bulan September belum terdapat rencana aksi dalam mendukung kegiatan ini			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
13	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50,000,000	19,747,866	39.50	1	RekomendasiKebijakan	0.00	0.00	0.0000	65.00	29.98	01	PN	Belum terdapat aksi dalam mendukung kegiatan ini			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
14	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA994	Layanan Perkantoran	6,993,073,000	4,693,712,538	67.12	1	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	7.85	00	Non PN	Layanan Gaji dan Tunjangan Bulan September			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
15	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	REB002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	850,000,000	607,018,322	71.41	2	Jenis	0.00	10.00	0.0000	78.00	6.59	01	PN	- mengikuti Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang - mengikuti Pembahasan Usulan Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan 2025 Wilayah Kerja LPSPL Sorong - Melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan pada bulan September 2024 dengan pungutan PNBP sebesar 103,661,660			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
16	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	300,000,000	119,602,500	39.87	5	Unit	2.00	45.00	2.0000	50.00	10.13	01	Non PN	Pengadaan alat selam untuk satker Ambon dan Ternate			01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

17	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2362	PEC001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70,000,000	30,403,343	43.43	1	Kesepakatan	0.00	0.00	1.0000	100.00	56.57	01	PN	Penerimaan mahasiswa magang dari Kampus UKIP ke kantor LPSPL Sorong	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
18	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	91,854,000	62,665,009	68.22	1	Dokumen	0.00	8.33	0.0000	74.97	6.75	00	Non PN	- Pembukaan blokir belanja modal pagu rupiah murni - Pembahasan anggaran lautra - Revisi DIPA LPSPL Sorong yang ke 8 - Penyampaian Proyeksi serapan anggaran akun 53, 52 dan 51 LPSPL Sorong	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
19	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA957	Layanan Hukum	440,000,000	325,751,526	74.03	1	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	0.94	00	Non PN	Telah dilakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan kelautan dan ruang laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV Dapil Maluku	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
20	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	4346	QDD001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800,000,000	699,414,986	87.43	4	Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	4.0000	100.00	12.57	01	PN	Tidak terdapat rencana aksi yang mendukung kegiatan ini	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
21	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25,732,000	3,726,500	14.48	1	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	60.49	01	Non PN	Pada bulan September LPSPL Sorong telah melakukan rapat WBK setiap hari rabu untuk memonitoring pemenuhan dokumen WBK 2024	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
22	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBA956	Layanan BMN	121,186,000	69,588,668	57.42	9	Layanan	0.00	8.33	0.0000	74.97	17.55	00	Non PN	Penyusunan dan Penelaahan RK BMN tahun 2024	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

23	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	03207	9	2367	EBC954	Layanan Manajemen SDM	575,176,000	503,653,349	87.57	30	Orang	0.00	0.00	30.0000	100.00	12.43	00	Non PN	- LPSPL Sorong mengikuti percobaan pengembangan metode uji kompetensi lingkup KKP - LPSPL Sorong mengikuti sosialisasi kode etik dan core value BERAKHLAK- LPSPL Sorong mengikuti uji kompetensi - LPSPL Sorong mengikuti sosialisasi kode etik dan core value BERAKHLAK	01-OCT-24	02-OCT-24	Lihat catatan
----	--------	---	-------	---	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	-------	----	-------	------	------	---------	--------	-------	----	--------	--	-----------	-----------	---------------



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	89.86	99.44	86.67	100.00	91.59	96.14	95.23	100%	0.00	95.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.89	8.67	10.00	9.16	24.04				
					Nilai Aspek	94.93		94.42				96.14				